



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT No. SK 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Palestina terhadap
Israel Sejak Meningkatnya Intensitas Konflik Fatah dan
 Hamas”**

Skripsi

Oleh

Reyhan Irawan

2014330188

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT No. SK 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Palestina terhadap
Israel Sejak Meningkatnya Intensitas Konflik Fatah dan
 Hamas”**

Skripsi

Oleh

Reyhan Irawan

2014330188

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Reyhan Irawan
Nomor Pokok : 2014330188
Judul : "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Palestina terhadap Israel Sejak Meningkatnya Intensitas Konflik antara Fatah dan Hamas"

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 18 Juli 2018
dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris
Dr. I Nyoman Sudira

: 

Anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Irawan
NPM : 2014330188
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : “Perubahan Politik Luar Negeri Palestina terhadap Israel Sejak Meningkatnya Intensitas Konflik Fatah dan Hamas”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2018



Reyhan Irawan

Abstrak

Nama : Reyhan Irawan
NPM : 2014330188
Judul : **“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Palestina terhadap Israel Sejak Meningkatnya Intensitas Konflik Fatah dan Hamas”**

Kedatangan kaum Philistines 1.200 tahun sebelum Masehi (SM) di Kanaan merupakan awal mula terjadinya konflik perebutan wilayah antara Palestina dan Israel. Kedua negara memiliki dasar klaim masing-masing atas kepemilikan wilayah Kanaan yang saat ini merupakan wilayah Palestina. Serangkaian upaya perdamaian telah dilakukan oleh kedua negara, namun belum memberikan hasil yang signifikan. Salah satu hal yang menghambat proses perdamaian adalah pergantian puncak kepemimpinan di dalam negeri Palestina yang diwarnai dengan konflik antara Fatah dan Hamas yang merupakan dua partai politik terbesar di negaranya. Perbedaan ideologi dan sikap antara Fatah dan Hamas terhadap Israel membuat kebijakan luar negeri Palestina terhadap Israel berbeda dari masa ke masa yang pada akhirnya mempengaruhi proses perdamaian. Penelitian ini dibuat dengan rumusan pertanyaan penelitian “Bagaimana konflik antara Fatah dan Hamas berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Palestina terhadap Israel?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan konsep *Struggle of Power* milik Realisme Klasik sebagai pedoman serta didukung oleh beberapa teori seperti *Protracted Social Conflict* milik Edward Azar, Empat Ciri Khas Konflik milik Hugh Miall, dan *Domestic Determinants* milik Howard Lentner. Penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara serta studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis menghasilkan satu penemuan, yaitu pergantian kekuasaan di dalam negeri Palestina mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat. Selama dibawah kepemimpinan Fatah, kebijakan Palestina terhadap Israel cenderung lunak dan terbuka terhadap negosiasi. Hal tersebut dibuktikan dengan terciptanya Perjanjian Oslo I, Perjanjian Oslo II, dan Pertemuan Camp David. Sebaliknya sejak 2006, kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh Hamas menjadi keras terhadap Israel dan sangat berorientasi pada keuntungan mutlak bagi Palestina dan bukan berorientasi pada terciptanya perdamaian. Hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan Hamas yang menyebutkan akan mengakui Israel dengan syarat pengembalian wilayah Palestina seperti sebelum Perang Enam Hari (*Six Days War*) berlangsung tahun 1967. Hal ini tentu sulit dipenuhi oleh Israel. Kondisi yang sedemikian rupa membuat perdamaian diantara keduanya sulit terwujud.

Kata kunci: Palestina, Israel, Konflik, Fatah, Hamas

Abstract

Name : Reyhan Irawan
NPM : 2014330188
Title : **“Alteration in Palestine Foreign Policy towards Israel since the Increasing Conflict Intensity between Fatah and Hamas”**

The arrival of the Philistines 1.200 years BC in Canaan was the beginning of conflict between Palestine and Israel. Both countries have their very own base of claim to the contested land. A series of peace efforts have been made by both countries, but a significant result have not showed up yet. One of the things that hamper the peace process is the change of leadership in Palestine. Fatah and Hamas, the two largest political parties in the countries involved in a domestic conflict. The differences of ideology and gesture between the two parties towards Israel affects Palestine foreign policy from time to time, which eventually affects the peace process between Palestine and Israel. This research is made with the research question of "How does the conflict between Fatah and Hamas play a role in the process of formulating the Palestine foreign policy towards Israel?" To answer the research questions, the author uses the concept of Struggle of Power belongs to Classical Realism as a guide and supported by several theories such as Edward Azar's Protracted Social Conflict, Hugh Miall's Four Conflicts Thew, and Howard Lentner's Domestic Determinants. The author uses descriptive method and perform data collection through interviews and literature studies. Based on the analysis that has been made, the author produces one discovery, namely the change of power within the Palestinian state influence the foreign policy made. Under the leadership of Fatah, Palestinian policy towards Israel tends to be soft and open to negotiations. Proven with the creation of the Oslo I Agreement, Oslo II Agreement, and Camp David Summit. Otherwise since 2006, the foreign policy established by Hamas has been hard on Israel and oriented to the absolute advantage of the Palestine side instead of the creation of peace. Proven by the policy of Hamas which will recognize Israel with the condition of the return of Palestine territory as before the Six Days War (1967) taking place. This is certainly difficult to be fulfilled by Israel as the West Bank has been partially occupied for a long time and the current status of Jerusalem is fully claimed by Israel itself. Such conditions make peace between the two countries difficult to achieve.

Keywords: Palestine, Israel, Conflict, Fatah, Hamas

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	11
1.2.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Literature Review.....	12
1.5 Kerangka Pemikiran.....	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.6.1 Metode Penelitian.....	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7 Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II-KONFLIK PALESTINA-ISRAEL YANG BERLARUT-LARUT	26
2.1 Empat Prakondisi Konflik Palestina-Israel.....	26
2.1.1 Sejarah Singkat Kaum Yahudi dan Arab di Palestina.....	26
2.1.2 Sengketa Tanah yang Dijanjikan: Prespektif Palestina dan Israel.....	31
2.1.3 Perjanjian Oslo I dan II.....	36
2.1.4 Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Palestina-Israel.....	46

2.2 Dinamika Konflik Palestina-Israel	
2.2.1 Adu Strategi Kelompok Arab Palestina dan Yahudi Israel.....	50
2.2.2 Konflik Terbuka Palestina dan Israel: Perang 1948.....	56
2.2.3 Efek Panjang Presepsi Buruk Satu Sama Lain.....	59
BAB III - ISRAEL DAN DINAMIKA HUBUNGAN FATAH-HAMAS.....	61
3.1 Empat Kriteria Konflik.....	61
3.1.1 Profil Fatah dan Hamas.....	61
3.1.2 Perbedaan Sikap dan Pandangan terhadap Israel.....	69
3.1.3 Pemilihan Umum Legislatif 2006 dan Perang Gaza 2007.....	72
3.1.4 Perjanjian Perdamaian Fatah-Hamas 2017.....	75
BAB IV - KEBIJAKAN FATAH DAN HAMAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KONFLIK PALESTINA- ISRAEL.....	79
4.1 <i>The Divided House: Foreign Policy Begins at Home</i>	79
4.1.1 Kebijakan Luar Negeri Palestina Terhadap Israel Tahun 1988-2006....	79
4.1.2 Kebijakan Luar Negeri Palestina Terhadap Israel Tahun 2006-2018....	84
4.2 Hubungan Palestina-Israel Pasca Perjanjian Damai Fatah-Hamas Tahun 2017.....	89
BAB V – KESIMPULAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	102

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perjanjian Oslo I.....	40
Tabel 2.2 Perjanjian Oslo II.....	43
Tabel 3.1 Perjanjian Damai Fatah dan Hamas Tahun 2017.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang permasalahan antara Palestina dan Israel tidak bisa dilepaskan dari kehadiran tiga agama Abrahamik yakni Yahudi, Kristen, dan Islam yang telah hidup berdampingan di Yerusalem selama ribuan tahun. Kedamaian yang telah terjalin lama harus pupus dengan pecahnya Perang Salib I di Dorylaeum (kini berada di wilayah Turki) tahun 1097. Sejak saat itu, hubungan ketiga agama Abrahamik tersebut tidak lagi pernah sama.¹ Perang Salib I hanyalah pembuka dari serangkaian perang yang terjadi setelahnya. Perang yang melibatkan tiga agama besar ini terus berlanjut hingga tahun 1444 yang “sementara berakhir” di Varana, Bulgaria dengan hasil kemenangan bagi umat Muslim yang diwakili oleh Kesultanan Utsmaniyah (*Ottoman Empire*) yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II.²

Kesultanan Utsmaniyah memenangkan banyak perang dan pada puncak kejayaannya, wilayah teritorial kesultanan ini menjalar sampai ke tiga benua yakni Asia, Eropa, dan Afrika.³ Pada awal abad 19, wilayah yang hari ini disebut sebagai Palestina dan Israel masuk kedalam kekuasaannya. Di bawah kekuasaan

¹ Kelly, Devries. *Battles of The Crusades 1097-1444*. London: Amber Books, 2007. hal 18

² *Ibid.*, hal 206

³ Donald Quataert. *The Ottoman Empire 1700-1922*. London: Cambridge University Press, 2005. hal. 22

Kesultanan Utsmaniyah, umat Yahudi, Kristen, dan Islam yang berada di Yerusalem dan sekitarnya dapat hidup damai berdampingan. Meskipun demikian, perasaan dan kesadaran bahwa mereka sedang dijajah itu tetap ada. Kaum Arab lebih merasa jati dirinya adalah sebagai orang Palestina, bukan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Dan di saat yang bersamaan, gerakan Zionisme yang menganggap bahwa Yudaisme bukan hanya agama tapi juga bagian dari nasionalisme, berkembang pesat di Eropa. Hal ini membuat puluhan ribu umat Yahudi di Eropa bermigrasi ke wilayah Palestina yang saat itu masih berada dibawah kuasa Kesultanan Utsmaniyah.

Keadaan berubah sesaat setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918. Kesultanan Utsmaniyah yang kalah dalam perang harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada pihak yang menang. Wilayah Palestina berpindah tangan ke pihak Inggris. Dibawah penguasaan Inggris, migrasi Yahudi secara masif diperbolehkan sehingga membuat semakin banyak Yahudi datang ke wilayah Palestina. Hal ini menciptakan gesekan *internal* antara kaum Arab dan Yahudi pendatang. Tahun 1930, Inggris mulai membatasi migran Yahudi yang masuk dan kemudian direspon oleh kaum Yahudi dengan cara militan, yakni menyerang penduduk lokal Arab dan melakukan pemberontakan terhadap Inggris.

Selama ribuan tahun kaum Yahudi dan Arab telah hidup berdampingan di wilayah Palestina, namun di abad ke-20 kedua kaum bersaudara tersebut bersitegang satu sama lain. Meskipun saat itu berada dibawah kekuasaan Inggris, keduanya sama-sama bersikukuh memiliki hak kepemilikan atas tanah yang mereka tempati. Kaum Arab Palestina memandang kaum Yahudi sebagai imigran gelap,

“predator”, dan “monster” karena telah sewenang-wenang dalam menempati wilayah atas dasar “Tanah Yang Dijanjikan” seperti yang tercantum di kitab suci agama Yahudi.⁴ Di sisi lain, kaum Yahudi Jerman baru saja mengalami peristiwa pembantaian massal oleh pemerintah Nazi-Jerman yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler tahun 1945. Momentum peristiwa pembantaian massal tersebut membuat dunia mendukung terbentuknya sebuah negara Yahudi. Hal ini membuat ketegangan antara kaum Arab dan Yahudi semakin tinggi.

Ketegangan yang sudah ada bereskalasi menjadi aksi kekerasan sektarian. Banyak korban berjatuh dari masing-masing pihak. Hal ini menggerakkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membuat sebuah gagasan sebagai upaya menghentikan kekerasan dan mendamaikan kedua belah pihak. Solusi yang PBB tawarkan adalah dengan cara membagi wilayah Palestina yang diperebutkan tersebut menjadi dua negara, solusi ini dikenal dengan nama Resolusi no. 181 yang berisikan; sebagian wilayah untuk kaum Yahudi dan sebagian lain untuk kaum Arab (*Two State Solutions*).⁵ Kaum Yahudi menerima gagasan tersebut dan kemudian mendeklarsikan pembentukan negara Israel tahun 1948. Lahirnya negara Israel membuat negara-negara yang tergabung di Liga Arab berang dan menuduh bahwa solusi yang ditawarkan PBB hanyalah sebuah bentuk baru kolonialisme orang-orang Eropa.

Di tahun yang sama yakni 1948, negara-negara Arab yang tergabung di Liga Arab mendeklarsikan perang terhadap Israel. Hasilnya adalah kemenangan bagi

⁴ Esther, Benbassa. "Zionism in the Ottoman Empire." *Studies in Zionism*, 1990, hal. 11-14.

⁵ United Nations, "A/RES/181(II) of 29 November 1947"

Israel yang berarti Israel mendapatkan wilayah baru yakni sebagian Yerusalem dan bagian-bagian lain yang menurut Resolusi 181 tahun 1947 adalah milik Palestina. Kemenangan yang diraih membuat Israel unjuk gigi, puluhan ribu warga Arab Palestina diusir dan seketika mereka menjadi pengungsi (*refugee*). Satu tahun kemudian, Israel menguasai seluruh wilayah Palestina kecuali Gaza yang dikontrol oleh Mesir dan Tepi Barat yang saat itu dikontrol Yordania.

Tahun 1967, kembali terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab yakni Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Libanon selama enam hari. Perang ini dikenal dengan nama *Six Days War* dimana Israel kembali keluar sebagai pemenang dan kali ini berhasil mengambil alih Dataran Tinggi Golan (*Golan Heights*) yang sebelumnya dikontrol oleh Suriah, Tepi Barat yang dijaga oleh Yordania, serta Gaza dan Semenanjung Sinai yang dikontrol oleh Mesir. Kini Israel menguasai seluruh teritorial wilayah Palestina ditambah Semenanjung Sinai yang berada di wilayah Mesir.⁶ Penguasaan penuh Israel terhadap teritorial barunya tersebut berlangsung cukup lama yakni selama sebelas tahun hingga disepakatinya Perjanjian Camp David (*Camp David Accords*).

Tahun 1978, Perjanjian Camp David terbentuk atas inisiasi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Jimmy Carter. Dua negara yang bertikai yakni Israel yang dipimpin Menachem Begin dan Mesir yang dipimpin Anwar Sadat menyepakati pengembalian wilayah Semenanjung Sinai ke tangan Mesir. Sadat dan Begin mendapatkan Nobel Perdamaian atas pencapaiannya dalam mendamaikan kedua

⁶ Jewish Publication Society. *American Jewish Yearbook: The Arab-Israel War of 1967*. New Jersey: Chemical Press. 1968. hal 125

negara. Negara-negara Arab berang atas keputusan Sadat yang berdamai dengan Israel. Reaksi lebih keras ditunjukkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) di Mesir yang menyebut Sadat sebagai penghianat dalam perjuangan bersama membela kemerdekaan Palestina. Demikian halnya dengan *Palestine Liberation Organization (PLO)* yang kecewa terhadap Sadat. Bahkan, Liga Arab sampai membekukan sementara keanggotaan Mesir selama sepuluh tahun yakni 1979-1989.⁷ Tidak sampai disitu, keputusan yang Sadat ambil harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Pada tanggal 6 Oktober 1981, ia dibunuh oleh Khalid Islambouli, seorang ekstrimis dan pejuang kemerdekaan Palestina. Meskipun investigasi pihak berwenang menyebutkan ada beberapa motif lain yang membuat Sadat terbunuh, satu hal yang kita bisa yakini bersama adalah pembunuhan tersebut tidak bisa dilepaskan dari keputusan Sadat untuk menandatangani Perjanjian Camp David.

Setelah Perjanjian Camp David dibuat, intensitas konflik Israel dan negara-negara Arab cenderung menurun. Kini, masalah yang dihadapi berasal dari dalam wilayahnya sendiri yaitu persoalan tentang penduduk Arab Palestina yang berada di Gaza dan Tepi Barat. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, setelah menang dalam *Six Days War*, Israel menguasai seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza dan Tepi Barat yang seyogyanya adalah milik Palestina bila merujuk pada Resolusi 181. Babak baru konflik dimulai, PLO yang dibentuk tahun 1964 mulai memberontak dengan cara melakukan aksi terorisme. Israel membalas dengan mengerahkan kekuatan militernya. Di saat yang bersamaan, Israel melakukan

⁷ BBC, *Timeline: Arab League*, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/1550977.stm, diakses 28 Maret 2018

pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza dan Tepi Barat. Tercatat dari tahun 1970 hingga 2015, sebanyak kurang lebih 600.000 penduduk Israel telah bermukim di Gaza dan Tepi Barat.⁸

Memasuki era 1980-an, rasa frustrasi mendalam yang dirasakan oleh rakyat Palestina sampai pada puncaknya. Terjadilah sebuah aksi “Intifadah” yang secara bahasa berarti “mengguncang untuk melepaskan” diri dari belenggu penjajah yang dalam hal ini adalah Israel. Aksi Intifadah I berlangsung selama lima tahun dan memakan korban sebanyak 277 orang di pihak Israel dan 1.962 orang di pihak Palestina.⁹ Jumlah korban aksi Intifadah I tidak memuaskan rakyat Palestina. Mereka menganggap bahwa kekalahan yang dialami adalah akibat PLO yang terlalu lembek dan terlalu *compromise-minded* terhadap Israel. Tahun 1987, lahirlah *Ḥarakat al-Muqāwamah al-’Islāmiyyah* (Hamas) sebagai jawaban atas keputusan rakyat Palestina. Hamas membawa harapan baru dengan misi utamanya yaitu menghendaki kehancuran bangsa Israel.

Tahun 1993, Amerika Serikat kembali menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi Palestina dan Israel untuk membuat Perjanjian Oslo (*Oslo Accords*) yang isinya adalah pembentukan Otoritas Palestina (*Palestinian Authority*) serta Israel berjanji untuk menarik pasukannya dari Gaza dan Tepi Barat sebagai bentuk itikad baik dari kedua negara untuk mencapai perdamaian. Dua hal tersebut mengundang reaksi keras dari rakyat Israel. Perdana Menteri (PM) Israel saat itu, Yitzhak Rabin disebut

⁸ B’TSELEM, *Statistics on Settlements and Settler Population*, <https://www.btselem.org/settlements/statistics>, diakses 28 Maret 2018

⁹ Zachary Lockman. *Intifada: The Palestinian Uprising against Israeli Occupation*. New York: South End Press. 1989. hal. 5

penghianat bangsa dan disamakan dengan Adolf Hitler oleh rakyatnya sendiri. Tak lama kemudian sesaat setelah menandatangani Perjanjian Oslo II tahun 1995, Rabin dibunuh oleh seorang warga negara Israel bernama Yigal Amir yang diketahui adalah seorang penganut agama Yahudi Ortodox dan memiliki kaitan dengan sayap kanan pemerintahan Israel.¹⁰

Pada tahun 2000, diadakan Pertemuan Camp David (*Camp David Summit*) di tempat yang sama dengan Perjanjian Camp David (*Camp David Accords*) tahun 1978. Palestina diwakili oleh Yasser Arafat, Israel diwakili oleh Ehud Barak, dan Bill Clinton bertindak sebagai tuan rumah. Negosiasi berjalan alot di pertemuan ini. Keinginan Palestina untuk merdeka dan berkuasa penuh di Gaza serta Tepi Barat tidak dapat dipenuhi oleh Israel dengan berbagai alasan. Singkat kata, Palestina merasa bahwa pertemuan tersebut adalah kosong belaka dan kemerdekaan yang diimpikan tidak kunjung terwujud.

Hal tersebut membuat aksi “Intifadah II” meletus tanggal 28 September 2000 dengan kekuatan tiga kali lebih besar dari Intifadah I.¹¹ Aksi yang berlangsung selama lima tahun tersebut merubah arah konflik. Israel menjadi bersikap dingin karena Palestina selalu bereaksi dengan cara keras dalam menyikapi upaya perdamaian yang ada. Jelang beberapa lama, perpolitikan domestik Israel bergeser ke arah kanan yang berarti lebih nasionalis. Israel yang mulai skeptis akan terciptanya perdamaian memilih untuk *me-manage* konflik dengan cara

¹⁰ CNN, *I have no regrets; Law student confesses to killing Rabin*, <http://www.cnn.com/WORLD/9511/rabin/amir/index.html>, diakses 28 Maret 2018

¹¹ Amos Harel, *Years of Rage*, <https://www.haaretz.com/1.5119693>, diakses 28 Maret 2018

membangun tembok-tembok pemisah wilayah untuk mengontrol pergerakan rakyat ekstrimis Palestina yang seringkali mengancam rakyatnya. Sementara di lain sisi, rakyat Palestina merasa upayanya selama ini untuk merdeka tidak membuahkan hasil apapun; baik jalur negosiasi ataupun kekerasan sama-sama gagal. Rakyat Palestina merasa buntu berada dibawah okupasi Israel yang kian hari kian meluas. Adanya kelompok ekstrimis dari kedua belah pihak membuat konflik sulit berakhir karena sama-sama ingin melihat lawan hancur lebur.

Malang bagi Palestina, pukulan berat belum berhenti sampai disitu. Tahun 2004, Yasser Arafat meninggal dunia. Sosok Arafat yang mampu menciptakan keseimbangan antar fraksi dan elemen masyarakat di Palestina kini telah tiada. Hilangnya sosok Arafat membuat kondisi perpolitikan dalam negeri Palestina tidak lagi stabil. Kelompok Fatah dan Hamas yang berbeda metode dalam menyikapi Israel bersitegang satu sama lain. Ketegangan menjadi lebih intensif setelah Hamas memenangkan Pemilu Legislatif tahun 2006 dengan perolehan suara sebanyak 44.45% dari jumlah pemilih yang membuat Hamas berhak atas 74 kursi dari total 132 kursi di Dewan Legislatif Palestina (*Palestinian Legislative Council*).¹² Kemenangan tersebut secara otomatis memberikan Hamas posisi serta wewenang yang sah di mesin pemerintahan Palestina dan artinya sejak saat itu hingga hari ini, Hamas memiliki andil dalam pembentukan kebijakan-kebijakan dalam maupun luar

¹² Scott Wilson, *Hamas Sweeps Palestinian Elections, Complicating Peace Efforts in Mideast*, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/26/AR2006012600372.html>, diakses 28 Maret 2018

negeri yang dibuat dan secara langsung ataupun tidak langsung, akan mempengaruhi hubungan Palestina dengan Israel.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan muncul saat perpecahan di dalam negeri Palestina terjadi. Lahirnya kelompok *Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʿIslāmiyyah* (Hamas) tahun 1987 menambah daftar panjang fraksi yang ada di Palestina. Tercatat ada banyak fraksi lain diluar Fatah dan Hamas seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik Populer untuk Pembebasan Palestina (DFLP), *Ḥarakat al-Jihād al-Islāmi fī Filastīn* (Gerkan Jihad Islami), dan *Jaysh al-Islām* (Tentara Islam) yang semuanya memiliki perbedaan ideologi dan tujuan masing-masing kecuali satu hal yakni ingin memiliki kekuasaan di tanah Palestina.¹³

Dengan banyaknya fraksi yang ada, dibutuhkan keseimbangan antar elemen agar situasi politik yang kondusif di dalam negeri dapat tercipta. Bila ada seseorang yang mampu mewedahi semua kepentingan kelompok dan memberikan keseimbangan itu, Yasser Arafat adalah orangnya. Beliau adalah Presiden pertama Palestina yang menjabat selama dua periode yakni periode 1994-1999 dan periode 1999-2004. Selama Arafat ada, keseimbangan antar fraksi dapat tercipta sehingga tidak ada gesekan antar kelompok dalam negeri Palestina yang tergolong serius

¹³ Nathan, Brown. "The Hamas-Fatah Conflict: Shallow but Wide." *The Fletcher Forum of World Affairs* 34, no. 2 (2010): 37-51. Diakses 1 September, 2017.
<https://search.proquest.com/docview/741167437?accountid=31495>.

dalam jeda waktu tersebut. Arafat meninggal dunia tanggal 11 November 2004 saat menjalani periode keduanya sebagai Presiden Palestina.

Setelah Arafat tiada, keseimbangan yang sebelumnya ada seakan hilang tak berbekas dan semua fraksi kini berlomba untuk berkuasa di Palestina. Dua kelompok terbesar dan paling dominan diantara fraksi yang ada adalah Fatah dan Hamas. Pemilihan Umum 2005 menobatkan Mahmoud Abbas dari fraksi Fatah sebagai Presiden kedua Palestina dan masih berkuasa hingga saat ini. Fatah yang berkuasa diprediksi akan menang secara mudah di Pemilu Legislatif tahun 2006, namun kenyataannya tidak demikian. Secara mengejutkan, Hamas keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 44.45% dari jumlah pemilih yang membuat Hamas berhak atas 74 kursi dari total 132 kursi di Dewan Legislatif Palestina (*Palestinian Legislative Council*).¹⁴

Transisi perpindahan kekuasaan legislatif di Palestina tidak berjalan mulus. Fraksi Fatah yang kalah dalam Pemilihan Legislatif tahun 2006 enggan lengser dari kekuasaan sehingga memaksa Hamas untuk menempuh jalur kekerasan demi mendapatkan haknya. Bentrokan kedua kubu terjadi di Gaza tahun 2007 dan mengakibatkan ratusan orang tewas. Sejak saat itu, Palestina dikendalikan oleh dua fraksi yakni Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza yang mana keduanya saling berselisih dan bertentangan dalam hal menyikapi keberadaan Israel; Fatah memilih

¹⁴ Scott Wilson, *Hamas Sweeps Palestinian Elections, Complicating Peace Efforts in Mideast*, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/26/AR2006012600372.html>, diakses 28 Maret 2018

untuk mengakui kemerdekaan Israel, sementara Hamas tidak.¹⁵ Adanya dualisme dalam tubuh pemerintahan Palestina sedikit banyak akan mempengaruhi pembentukan kebijakan negara yang secara otomatis berpengaruh pada situasi konflik antara Palestina dan Israel.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi waktu penelitian antara tahun 1993 hingga 2018. Tahun 1993 adalah tahun dimana Perjanjian Oslo I dibuat dan sejak saat itu, perpecahan antara Fatah dan Hamas dimulai. Akhir tahun 2017 hingga awal 2018 merupakan tahun yang penting karena Fatah-Hamas menyepakati perjanjian untuk berdamai dimana hal tersebut merupakan perkembangan terkini situasi politik di Palestina. Penulis akan memberikan gambaran kondisi konflik berlarut antara Palestina-Israel dengan menggunakan teori *Protracted Social Conflict* milik Edward Azar, dinamika hubungan Fatah-Hamas melalui teori *Conflict* milik Hugh Miall, dan gambaran bagaimana kondisi domestik Palestina mempengaruhi hubungannya dengan Israel melalui teori *Domestic Determinants* milik Howard H. Lentner.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat formulasi pertanyaan penelitian (*research*

¹⁵ Nathan, Brown. "The Hamas-Fatah Conflict: Shallow but Wide." *The Fletcher Forum of World Affairs* 34, no. 2 (2010): 37-51. Diakses 1 September, 2017.
<https://search.proquest.com/docview/741167437?accountid=31495>.

question) sebagai berikut; **“Bagaimana konflik Fatah dan Hamas berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Palestina terhadap Israel?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran realitas kompleks mengenai bagaimana dinamika hubungan Fatah-Hamas mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Palestina terhadap Israel.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menjadi referensi tambahan bagi para peminat studi konflik, studi kawasan Timur Tengah, studi keamanan, serta untuk memperluas khazanah Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Literature Review

Penulis akan melakukan ulasan terhadap tiga buku yang berhubungan dengan konflik Fatah-Hamas dan Konflik Israel-Palestina dari dua sudut pandang tokoh Yahudi dan Palestina yang diulas secara adil dan seimbang. Buku pertama berjudul *" Hamas vs. Fatah: The Struggle of Palestine "* yang ditulis oleh Jonathan Schanzer terbitan Palgrave Macmillan tahun 2008 dan buku kedua berjudul *"The*

Palestine-Israeli Conflict: A Beginner's Guide" yang ditulis oleh Dan Cohn-Sherbok (Yahudi) dan Dawoud El-Alami (Palestina) yang diterbitkan oleh Oneworld Publications tahun 2001 dan buku ketiga yang berjudul "*International Relations of The Middle East*" yang ditulis oleh Louise Fawcett dan diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 2005.

Buku pertama yaitu "*Hamas vs. Fatah: The Struggle of Palestine*" karya Jonathan Schanzer yang membahas secara lengkap mengenai dinamika Hamas dan Fatah dari mulai awal terbentuk hingga tafsiran mengenai prospek perubahan situasi antar kedua kubu¹⁶. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa sejak awal pendiriannya, Hamas tidak pernah berinisiatif memerangi *Palestine Liberalization Organization* (PLO) yang pada saat itu dipimpin oleh Yaser Arafat dan Fatah, sayap militernya. Pemimpin Hamas, Asy-Syahid Syeikh Ahmad Yasin, sengaja memisahkan diri dari PLO, dengan tujuan untuk menegaskan garis perjuangan rakyat Palestina dimana selama puluhan tahun mereka juga berada di dalamnya. Namun sejak wafatnya Yaser Arafat tahun 2004, Fatah semakin bersikap kompromistis dan akrab dengan Israel. Di lain sisi, Hamas setia dengan prinsipnya yaitu siap melawan dan bersikap keras terhadap Israel. Hal tersebut membuat Hamas berang dan merasa bahwa mereka berada di jalan yang berbeda, meskipun sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Dari buku ini, penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor pemicu bertikainya Hamas dan Fatah adalah

¹⁶ Schanzer, Jonathan. "*Hamas vs. Fatah: The Struggle of Palestine*". New York: Palgrave Macmillan. 2008. hal. 13-22

mengenai perbedaan strategi dalam menghadapi Israel dan memerdekakan Palestina.

Buku kedua adalah "*The Palestine-Israeli Conflict: A Beginner's Guide*" karya Dawoud El-Alami. Pada buku ini, dijelaskan asal mula terbentuknya Palestina dari zaman kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah hingga masa kini¹⁷. Dibawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, Palestina menjadi tempat yang istimewa karena keberadaan Yerusalem-nya. Yerusalem sendiri adalah kota suci bagi tiga agama Abrahamik yakni; Yahudi, Kristen, dan Islam. Selama puluhan tahun di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, wilayah Palestina saat itu relatif aman dan jauh dari pertumpahan darah. Penganut ketiga agama diatas bebas beribadah dan keluar-masuk Yerusalem tanpa ada hambatan yang berarti. Kemudian, saat kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah tumbang, wilayah Palestina jatuh ke tangan Inggris hingga akhirnya lahirlah *Balfour Declaration* yang merupakan hasil negosiasi antara kaum Zionis dan Inggris yang menyepakati bahwa pemerintah Inggris siap berkomitmen untuk membantu umat Yahudi untuk mendapatkan *homeland* dan *homeland* tersebut berada di Palestina. Kesimpulan penulis, buku kedua ini adalah sumber rujukan yang cukup penting dan memberikan gambaran bagaimana dinamika terbentuknya Palestina dari sejak dahulu hingga saat ini. Sehingga, dalam menganalisis nantinya penulis akan mendapat pengetahuan yang mumpuni tentang sejarah negara Palestina.

¹⁷El-Alami, Dawoud. *The Palestine-Israeli Conflict: A Beginner's Guide*. Oxford: Oneworld Publications. 2001. hal. 129-146

Buku ketiga yaitu "*International Relations of The Middle East*" karya Louise Fawcett. Dalam buku ini, Fawcett memberikan gambaran yang utuh dan kompleks tentang dunia *internal affair* di kawasan Timur Tengah. Perang seakan adalah hal yang biasa terjadi di kawasan ini dan bila diteliti secara seksama, kekuatan atau *power* negara-negara di kawasan Timur Tengah relatif setara. Dari sudut pandang kaum Liberalis hal tersebut adalah hal yang amat baik, mengingat sifat hubungan yang terjalin adalah saling bekerja sama demi mencapai kepentingan masing-masing. Namun, pada kenyataannya sosok negara hegemon itu perlu tetap ada setidaknya untuk menjadi penengah konflik dan menjadi pihak yang mampu menjaga keamanan kawasan. Hal ini terbukti dari situasi konflik yang banyak melanda negara-negara Timur Tengah seperti perseteruan antara Arab Saudi-Iran, Mesir-Israel, dan Palestina-Israel yang penyelesaiannya perlu melibatkan negara dan organisasi internasional diluar kawasan yaitu Amerika Serikat dan PBB yang tentu saja memiliki kepentingan khusus dan seringkali terlambat untuk bertindak sehingga malah membuat situasi semakin keruh.¹⁸

Secara khusus, Fawcett membahas perang kaum Arab-Israel secara kronologis yang dimulai dari pembentukan negara Israel tahun 1948. Negara-negara Timur Tengah menolak memberikan pengakuan diplomatik terhadap kemerdekaan Israel dan melalui Liga Arab, mereka menyatakan diri untuk memboikot produk-produk perusahaan global yang berafiliasi dengan Israel. Api konflik yang telah tercipta terus membesar seiring terlibatnya Amerika Serikat dan

¹⁸ Louise Fawcett, "*International Relations of The Middle East*", Oxford: University Press. 2005. hal 196-214.

Russia dalam ranah perpolitikan Timur Tengah dan pada satu titik tidak lagi tertahankan. Tahun 1967 terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab yakni Suriah, Yordania, Irak, Mesir, dan Lebanon selama enam hari dimana Israel keluar sebagai pemenang. Kemenangan Israel pada perang enam hari tersebut membuat penduduk Palestina melakukan *eksodus* ke negara-negara tetangga sebab Jalur Gaza dan Tepi Barat kini dikuasai Israel. Tahun-tahun setelahnya semakin menguntungkan Israel dimana ekspansi penguasaan tanah Palestina semakin luas hingga saat ini.¹⁹

Kemudian, Fawcett juga membahas tuntas soal Proses Perdamaian Oslo (*Oslo Peace Process*) yang merupakan sebuah upaya untuk mendamaikan kubu Palestina dan Israel. Hal yang dibahas dimulai dari proses awal, reaksi masyarakat, dan adanya deklarasi perang saat proses perdamaian berlangsung²⁰. Penulis menyimpulkan bahwa buku ini dapat dijadikan referensi yang mumpuni dalam menyusun analisa di bab 2 yang berkaitan dengan konflik Palestina-Israel.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam studi ilmu hubungan internasional, terdapat beberapa teori utama yang menjadi landasan dalam menganalisa suatu masalah. Penulis menggunakan teori Realisme Klasik sebagai kaca mata utama dalam menyusun penulisan ini. Terdapat beberapa tokoh besar seperti Thucydides, Niccolo Machiavelli, Thomas

¹⁹ Louise Fawcett, “*International Relations of The Middle East*”, Oxford: University Press. 2005 .hal 218-236

²⁰ *Ibid.*, hal. 242-261.

Hobbes, dan Hans J. Morgenthau yang memiliki pandangan masing-masing namun sependapat dalam hal karakteristik yang membedakan teori Realisme Klasik dengan teori lain.

Karakteristik tersebut adalah; pertama, negara adalah aktor paling penting dalam dunia hubungan internasional. Kedua, sistem internasional bersifat anarki atau tidak ada sistem pemerintahan dunia yang membuat masing-masing negara berada di level yang sama. Ketiga, negara adalah aktor tunggal yang bersifat rasional. Rasional dalam artian bahwa negara mampu mencari cara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Salah satu kepentingan nasional suatu negara yang paling vital adalah kelangsungan hidup atau *survival*. Untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup atau *survive*, negara sangat bergantung pada *power*. Dalam bukunya yang berjudul "Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace", Hans J. Morgenthau menyebutkan; "*For the struggle for power on international scene is today not only a struggle for military supremacy and political domination, but in a specific sense a struggle for the minds of men (perception)*".²¹

Pernyataan Morgenthau tersebut menguatkan Teori Presepsi yang dikemukakan oleh Ole R Holsti. Holsti menyebutkan bahwa keputusan luar negeri suatu negara dalam upayanya untuk meraih *power* dipengaruhi oleh persepsi dari aktor pengambil kebijakan (*decision maker*) tentang fakta yang dilihat (*Das Sein*) dikaitkan dengan nilai yang dianut (*Das Sollen*).²² *Power* sendiri dapat diartikan

²¹ Hans J. Morgenthau. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Boston: Higher Education Press. 1948. Hal 148

²² Ole. R. Holsti. *Public Opinion and American Foreign Policy*. Michigan: The University of Michigan Press. 2004. Hal. 15

sebagai kekuasaan untuk menentukan kehidupan bernegara (tidak diatur negara lain). Upaya untuk meraih *power* umumnya ditempuh melalui konflik atau perang.²³

Menurut Hugh Miall, konflik dapat dipahami sebagai suatu situasi dimana terjadi persaingan untuk memenuhi tujuan yang tidak selaras dari kelompok yang berbeda.²⁴ Miall menyebutkan bahwa terdapat empat kriteria yang membedakan konflik dari situasi yang lain. Pertama, pelaku dalam konflik adalah negara atau kelompok yang signifikan dalam negara. Kedua, konflik hanya bisa ada apabila para pihak yang berseteru sama-sama mempresepsikannya sebagai konflik. Ketiga, konflik berakar dari adanya perbedaan yang jelas berkenaan dengan nilai, kepentingan, dan tujuan. Keempat, hasil dari konflik harus dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sangat penting bagi pihak yang bertikai.²⁵

Konflik dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Salah satu jenis konflik yang umum terjadi di berbagai belahan dunia adalah konflik sosial berlarut-larut atau *protracted social conflict*. Dalam bukunya yang berjudul *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*, Edward Azar mengajak kita untuk memahami bagaimana faktor domestik dan internasional berperan dalam konflik yang terjadi. Edward Azar membagi teorinya menjadi dua tahap yang saling berkaitan, yaitu; empat pra-kondisi (*four preconditions*) dimana sifat konflik masih tertutup dan dinamika proses (*process dynamics*) dimana sifat konflik sudah

²³ Robert Jackson & Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press. 2010. Hal 65-74

²⁴ Hugh Miall. *Contemporary Conflict Resolution, the Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*. Liverpool: Polity Press. 1999. hal 21-22

²⁵ *Ibid.*, hal 23-29

terbuka. Empat pra-kondisi tersebut adalah; kesamaan bersama (*communal content*), perampasan kebutuhan hidup manusia (*deprivation of human needs*), peran pemerintah dan negara (*government and state roles*), serta keterlibatan dunia internasional (*international linkage*).²⁶

Pertama, konflik dikaitkan dengan pra-kondisi yang disebut sebagai kesamaan bersama atau *communal content*. Dalam pra-kondisi ini, yang menjadi pemicu konflik adalah komposisi masyarakat yang beragam dan hubungan antara kelompok identitas (suku, ras, dan agama) yang ada di dalam masyarakat tersebut bersifat tidak harmonis. Terjadi persaingan dalam kurun waktu lama dan mengakibatkan satu kelompok identitas mendominasi kelompok lain.²⁷

Kedua, konflik juga dikaitkan dengan kebutuhan hidup manusia atau *human needs*. Yang menjadi topik utama dalam pra-kondisi ini adalah soal sejauh mana kelompok identitas mampu mendapatkan akses terhadap kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang utama adalah untuk bertahan hidup (*survival*) yang artinya semua kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, sandang, dan papan dapat terpenuhi secara layak. Kondisi yang menjadi pintu masuk terjadinya konflik adalah dimana terdapat kelompok identitas yang mendapatkan kebutuhan hidup berlimpah dan di saat yang sama terdapat kelompok lain yang kekurangan. Bila kebutuhan utama tidak

²⁶ Edward E. Azar. *The Mangement of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Hanover: Dartmouth Pub Co. 1990. hal 48

²⁷ *Ibid.*

terpenuhi, pihak yang membutuhkan tidak segan untuk melakukan kekerasan untuk mendapatkannya.²⁸

Ketiga, pra-kondisi yang ketiga yaitu peran pemerintah dan negara berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin semua kelompok identitas yang berada dibawah yuridiksinya untuk dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Di negara yang dilanda konflik sosial berlarut-larut, pemerintah pusat memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki wewenang penuh untuk mengambil kebijakan negara sehingga aspirasi akar rumput terabaikan. Hal tersebut seringkali membuat kebijakan yang dibuat atau diambil menjadi berjalan tidak efektif karena pro-kontra yang terjadi di dalam negeri.²⁹

Keempat, konflik erat berkaitan dengan keterlibatan internasional atau *international linkages* yaitu keterlibatan negara luar terhadap urusan domestik sebuah negara. Ada dua penyebab umum terjadinya keterlibatan internasional dalam urusan domestik suatu negara yaitu ketergantungan ekonomi (*economic dependency*) dan hubungan klien (*client relationship*). Kondisi ketergantungan yang terjadi antara suatu negara dengan sistem ekonomi global ataupun negara lain adalah dengan dibuatnya kebijakan yang lebih menguntungkan pihak asing daripada rakyat. Sementara itu, hubungan klien adalah keadaan dimana suatu

²⁸ Edward E. Azar. *The Mangement of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Hanover: Dartmouth Pub Co. 1990. hal 49

²⁹ *Ibid.*

negara membuat kebijakan yang menguntungkan negara asing sebagai bentuk imbalan atas penjaminan keamanan yang dilakukan negara asing tersebut.³⁰

Selanjutnya, saat konflik yang sebelumnya tertutup sudah berubah bentuk menjadi konflik terbuka, Edward Azar menyebutkan ada tiga hal yang menentukan keberlangsungan konflik tersebut, yaitu; aksi dan strategi komunal (*communal actions and strategies*), aksi dan strategi negara (*state actions and strategies*), dan mekanisme yang terbangun dari konflik (*built in mechanism of conflict*).³¹

Pertama, aksi dan strategi komunal (*communal actions and strategies*) mengacu pada beberapa hal yang berpotensi untuk memicu terjadinya konflik menjadi lebih besar. Kesadaran bersama akan keadaan buruk yang menimpa (*collective recognition of grievance*), secara alamiah mengarahkan kelompok tersebut untuk melakukan penentangan secara bersama-sama (*collective protest*). Penentangan yang dilakukan seringkali diikuti oleh tindakan kekerasan dan kemudian ditanggapi oleh pihak lain secara agresif. Seiring meningkatnya ketegangan, kelompok komunal atau kelompok identitas yang menjadi korban mulai menarik perhatian global dengan cara mengaitkan isu yang ada dengan isu lain seperti; keamanan, kebutuhan hidup, dan ketidaksetaraan dalam berpolitik. Isu yang berkembang menjadi banyak menciptakan suatu momentum bagi kelompok penentang (*protest group*) untuk mengatur dan memobilisasi kekuatan menjadi lebih besar. Hal tersebut juga diiringi dengan perkembangan taktik dan strategi negara

³⁰ Edward E. Azar. *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Hanover: Dartmouth Pub Co. 1990. hal. 50

³¹ *Ibid.*, hal 51-56

dalam mencari dukungan dari dunia luar. Bentuk dukungan hadir dalam bentuk dukungan secara langsung maupun partisipasi negara dalam berbagai organisasi yang dirasa menguntungkan dan mendekatkan mereka kepada kepentingan nasionalnya.³²

Kedua, dalam banyak kasus, bentuk paling nyata dari aksi dan strategi negara (*state actions and strategies*) dalam merespon kelompok penentang (*protest group*) adalah dengan cara represif untuk menghindari keadaan dimana negara terlihat lemah atau dikalahkan oleh negara lawan. Selain cara represif, terdapat cara menyetujui opsi bersama (*co-option*). Namun seringkali cara ini hanya berfungsi sebagai pemecah kekuatan pihak oposisi dan apabila negosiasi gagal dapat terjadi aksi kekerasan yang lebih besar. Kelompok komunal yang merepresentasikan negara sering kali tidak segan untuk melibatkan diri dalam perang demi meraih kepentingan atau sekedar mempertahankan keberadaannya.³³

Ketiga, mekanisme yang terbangun dari konflik (*built in mechanism of conflict*) adalah tentang bagaimana konflik yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bersifat terbuka memiliki dampak jangka panjang pula terhadap persepsi buruk terhadap masing-masing pihak yang berkonflik. Generasi saat ini yang sedang berkonflik kemungkinan besar telah terbentuk pola pikirnya dari generasi yang sebelumnya berkonflik dalam konflik yang sama. Demikian pula siklusnya akan berulang dimana generasi mendatang akan dibentuk pola pikir dan

³² Edward E. Azar. *The Mangement of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Hanover: Dartmouth Pub Co. 1990. hal. 54

³³ *Ibid.* hal.55

presepsinya oleh generasi yang saat ini sedang berkonflik. Siklus tersebut menjadi mekanisme yang membuat keberlanjutan konflik dari satu generasi turun ke generasi penerus sehingga membuat konflik yang terjadi sulit untuk mencapai titik akhir atau perdamaian.³⁴

Konflik yang terjadi sedikit banyak akan berdampak pada kondisi domestik dan secara otomatis mempengaruhi politik dalam dan luar negeri negara terlanda. Hal tersebut menjadi penting karena akan menentukan apakah konflik yang terjadi bisa terselesaikan atau malah terus berlanjut. Menurut Howard H. Lentner, ada 3 (tiga) hal yang merupakan penentu atau *Domestic Determinants* yakni; Pertama, *Highly Stable Determinants* yang terdiri atas luas dan lokasi geografis. Kedua, *Moderately Stable Determinants* yang merupakan kepemimpinan dan proses politik. Serta yang ketiga adalah *Unstable Determinants* yaitu sikap dan presepsi jangka panjang.³⁵ Pada penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan dua poin dari tersebut yakni proses politik yang bersifat *Moderately Stable* dan sikap serta presepsi jangka panjang yang bersifat *Unstable*. Kedua hal tersebut secara signifikan mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara dan otomatis mempengaruhi situasi konflik yang berlangsung.

³⁴ Edward E. Azar. *The Mangement of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Hanover: Dartmouth Pub Co. 1990. hal. 56

³⁵ Howard H. Lentner. *Foreign Policy Analysis: A Comprative and Conceptual Approach* London: Charles Merill Publishing. 1974. hal. 29

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis terkait dengan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif analitis mencakup cara pengumpulan, penyajian, dan analisis data sehingga menghasilkan suatu gambaran atas obyek yang diteliti, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dari keseluruhan penelitian.³⁶

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara terstruktur bersama narasumber. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder didapatkan dengan cara ekstraksi informasi yang berasal dari buku, jurnal, berita, dan sumber kearsipan lain yang dianggap menunjang penelitian ini.³⁷

³⁶John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Lincoln: Sage Publications. 2007. hal. 36

³⁷*Ibid.*, hal. 117

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian akan dibagi ke dalam lima bab utama, yakni Bab I, II, III, IV, dan V sebagai kesimpulan. Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, serta metode penelitian.

Bab II akan memberikan gambaran umum mengenai konflik yang terjadi melalui *Conflict Theory* yang dicetuskan oleh Hugh Miall dan konflik Palestina-Israel yang berlarut-larut akan dibahas melalui teori *Protracted Social Conflict* yang dipopulerkan oleh Edward Azar.

Bab III akan menyajikan pembahasan mengenai profil, perbedaan nilai, konflik, serta perjanjian perdamaian antara kubu Fatah dan Hamas melalui teori Konflik yang dipopulerkan oleh Hugh Miall.

Bab IV akan menggambarkan korelasi antara dinamika hubungan Fatah-Hamas dan pengaruhnya terhadap konflik Palestina-Israel melalui teori *Domestic Determinants* yang dipopulerkan oleh Howard H. Lentner.

Bab V adalah kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini pertanyaan penelitian akan dijawab sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan.